

PERSEPSI GURU PPKn SMA WILAYAH LAMONGAN TENTANG RADIKALISME DI INDONESIA

Zul'fatul Safaati

13040254058 (PPKn, FISH, UNESA) zulfatul.safaati@yahoo.co.id

I Made Suwanda

0009075708 (PPKn, FISH, UNESA) imadesuwanda@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi guru PPKn SMA di wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi guru PPKn SMA di wilayah Lamongan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Teknik sampling yang digunakan ialah *nonprobability sampling* berupa sampel jenuh dengan jumlah 93 guru PPKn. Hasil penelitian diketahui bahwa persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia diperoleh 94,62% atau 88 guru PPKn dengan kriteria persepsi negatif dan 5,38% atau 5 guru PPKn dengan kriteria persepsi positif. Data tersebut menunjukkan bahwa persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme termasuk dalam kriteria persepsi negatif, artinya guru PPKn tidak setuju dengan radikalisme karena tidak sesuai dengan Pancasila, Konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi adalah faktor fungsional atau pribadi dan faktor struktural atau objek. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 100% faktor tersebut berpengaruh. Namun, faktor yang paling berpengaruh dapat dilihat dari skor rata-rata 85,80 dari faktor fungsional dan skor rata-rata 78,80 dari faktor struktural. Data tersebut menunjukkan faktor fungsional yang paling berpengaruh, artinya radikalisme tidak sesuai dengan kepribadian guru PPKn.

Kata Kunci: Persepsi Guru PPKn, Radikalisme

Abstract

This study aims to analyze the perception of high school Civic teachers in Lamongan region about radicalism in Indonesia and to identify factors influencing the perception of high school Civic teachers in Lamongan region. The approach used is quantitative to the type of survey research. The sampling technique used is nonprobability sampling in the form of saturated sampling with the number of 93 Civic teachers. Based on the results of the research note that the perception of high school Civic teachers in Lamongan region about radicalism in Indonesia obtained 94.62% or 88 Civic teachers with negative perception criteria and 5.38% or 5 Civic teachers with positive perception criteria. The data shows that the perception of Civic teachers SMA Lamongan region about radicalism is included in the criteria of negative perception, meaning that Civic teachers do not agree with radicalism because it is not in accordance with Pancasila, Constitution and Unity in Diversity. Factors affecting perception are functional or personal factors and structural factors or objects. Based on the research results, 100% of these factors are influential. However, the most influential factors can be seen from the average score of 85.80 of the functional factors and the average score of 78.80 of the structural factors. The data shows the most influential functional factor, meaning radicalism is not in line with the personality of Civic teacher.

Keywords: Perception of Civic Teachers, Radicalism

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokratis yang menjamin kebebasan bagi setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 yang berbunyi: "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Jaminan terhadap kebebasan warga negara mengakibatkan muncul berbagai pemikiran warga negara Indonesia yaitu radikalisme.

Radikalisme merupakan sebuah pra kondisi menuju terorisme yang memiliki dua karakteristik utama yaitu penggunaan kekerasan dan bermotif agama berdasarkan *Center for the Study of Religion And Culture* (Yudha, 2012:154). Radikalisme di Indonesia pernah terjadi dalam kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama

dari fundamentalisme dan radikalisme yaitu mengenai kasus ledakan bom Bali I di Kuta, yang menjadi korban adalah para wisatawan Asing terjadi tahun 2002. Pada Tahun 2003 kelompok yang sama melakukan aksi teror bom di Hotel JW Marriot. Pada tahun 2004, terdapat aksi bom di depan Kedutaan Besar Australia, pada tahun 2005 kembali melakukan aksi yang sama di Bali, dan pada tahun 2009 telah melakukan aksi pengeboman di plaza Sarinah (Hamdani, 2012: 33-35).

Aksi radikalisme terus menyebar di daerah yang ada di Indonesia Menurut Ali Fauzi Manzi mantan instruksi bom Jamaah Islamiyah (JI) (dalam Astuti, 2016) menilai potensi gerakan radikal di Jawa Timur masih mengkhawatirkan di tiga daerah yaitu Malang, Lamongan dan Surabaya. Berdasarkan Anwar (2012:2), daerah Lamongan perlu perhatian serius dari pemerintah karena sebagai tempat narasi Islamisme yang belum bebas dari intoleransi yang menandai radikalisme dan militansi yang masih cukup tinggi. Hal tersebut menjadikan Lamongan terkenal dengan kota sarang teroris di Indonesia dan di dunia karena belum bebas dari intoleransi yang menandai radikalisme dan militansi dengan kasus bom Bali dan bom bunuh diri. Kasus tersebut dapat mengakibatkan masyarakat Lamongan yang beraktifitas dan tinggal di luar wilayah Lamongan atau di luar Indonesia dengan memperoleh perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak luar.

Radikalisme terus berkembang di berbagai wilayah dapat menjadi ancaman bagi generasi penerus bangsa. Radikalisme dapat menurunkan rasa kesadaran cinta tanah air dan jiwa nasionalisme penerus bangsa karena mudah terbawa arus kepada paham yang mencoba menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Ancaman tersebut dapat terjadi karena kurang memahami bahaya radikalisme. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dicegah dengan perlindungan melalui pendidikan soal ideologi dan nilai nasionalisme. Bentuknya dapat bermacam-macam, melalui kurikulum pelajaran sekolah mulai usia dini, ataupun sosialisasi pemahaman ancaman paham radikalisme dan terorisme kepada orang tua, guru dan yang paling penting yaitu kaum muda.

Berdasarkan Agus SB (dalam Abror, 2016:7) memberikan bukti dari pelaku terorisme dan radikalisme Islam yang melibatkan pemuda, baik pelajar, mahasiswa, maupun lulusan perguruan tinggi. Seperti, Dani Dwi Permana, berusia 18 tahun, tamat SMA pada 2009 di SMA Yadika, Kemang, Bogor. Pelaku bom bunuh diri di hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta bersama dengan Nana Ikhwan Pada 17 Juli 2009. Juga Arga Wiratama usianya 17 tahun siswa teknik mesin negeri 2 Klaten Jawa Tengah, yang divonis bersalah oleh pengadilan negeri Klaten karena melakukan tindak pidana terorisme, meletakan bom di delapan tempat

berbeda di Surakarta dan Klaten pada 1 Desember 2010-01 Januari 2011. Pihak mahasiswa terdapat nama Maruto Jati Sulisty, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung, Semarang.

Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin oleh Prof. Dr Bambang Pranowo yang juga guru besar sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 pada siswa dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jabodetabek. Penelitian tersebut diperoleh 50% pelajar setuju terhadap tindakan radikal. Data tersebut menyebutkan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Jumlah yang menyatakan setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama mencapai 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom. (Saidi, 2016). Hal tersebut menggambarkan bahwa dunia pendidikan kini telah di masuki paham radikal. Riset di atas masih bisa dipertanyakan kebenarannya begitupun dengan buku yang dikatakan mengandung unsur radikal masih bisa dipertanyakan. Hal ini harus dijadikan alarm untuk mengantisipasi generasi-generasi muda yang menganut paham radikal tersebut.

Perkembangan radikalisme dikalangan pelajar tersebut menjadi pusat perhatian karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan seseorang untuk menentukan bagaimana kehidupan yang akan dijalani di waktu mendatang. Seseorang berusaha untuk mendapat pendidikan yang baik karena pendidikan merupakan suatu proses penting yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Pendidikan memiliki pengaruh yang penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab II pasal 3, dapat dipahami bahwa pendidikan nasional menekankan pada pembentukan diri individu. Hal tersebut mendasari pelaksanaan sistem pendidikan nasional yakni jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, maka penting dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas.

Guru merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan paling penting dalam sistem pendidikan nasional yakni berkaitan dengan upaya mewujudkan pembangunan nasional khususnya pendidikan. Peran guru sebagai agen pembelajaran adalah peranan guru sebagai fasilitator, motivator, pemacu pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik (Mulyasa, 2007:53). Dapat di artikan bahwa guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dalam

upaya kemajuan bangsa dan negara. Selain itu guru memegang peran utama karena gurulah yang menjadi orang kedua di sekolah setelah pendidikan di keluarga. Melalui guru sikap dan karakter seorang anak didik dapat dibentuk dan dibiasakan melalui kehidupan sehari-hari di sekolah dan masyarakat serta diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih pada guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi salah satu hak yang penting. Guru PPKn diharapkan mampu menjadikan anak didik yang memiliki nilai dan moral yang baik dan menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.

PPKn merupakan kajian yang bertujuan menjaga Pancasila yang berbeda dengan radikalisme, karena radikalisme dapat mengancam nilai-nilai Pancasila dan kebhinnekaan Indonesia. Seperti radikalisme yang mengatasnamakan agama bertentangan dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” serta bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Selain itu radikalisme seringkali menimbulkan konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika.

Guru PPKn bukan hanya bertugas menyampaikan materi atau teori-teori namun dapat menanamkan sikapkewarganegaraan kepada peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadikan warga negara Indonesia menjadi lebih baik dengan memahami dan menerapkan ideologi Pancasila sebagai dasar pedoman bangsa dan wawasan nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, apa yang terjadi apabila guru PPKn mendidik, memberikan contoh moral dan karakter yang baik telah memiliki pandangan positif atau setuju dengan radikalisme. Tidak menutup kemungkinan peserta didik menjadi generasi bangsa yang brutal, anarkis dan radikal. Sebaliknya apabila guru PPKn tidak setuju dengan radikalisme akan menciptakan generasi penerus bangsa yang demokratis, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dan berpedoman pada Pancasila dan Konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa radikalisme telah mulai tumbuh di kalangan pelajar, sehingga bagaimana pandangan guru terutama guru PPKn. Radikalisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena mengabaikan toleransi antar umat beragama dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lamongan dipilih sebagai lokasi

penelitian mengingat Lamongan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi terorisme yang cukup tinggi sehingga penting dilakukan penelitian mengenai persepsi guru PPKn tentang radikalisme di Indonesia? dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persepsi guru PPKn SMA di wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.

Persepsi

Persepsi adalah tanggapan untuk penerimaan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca indera (KBBI, 2007). Berdasarkan Desiderato (dalam Rahmat, 2000:51), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimulus*). Bruner (dalam Sarwono, 2015:89) juga menyatakan persepsi ialah proses mengenali objek atau peristiwa dengan menarik kesimpulan berdasarkan sensasi yang diterima melalui indera.

Berdasarkan pengertian di atas, persepsi adalah suatu proses untuk memahami suatu objek tertentu dengan mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus inderawi sehingga didapat suatu makna atau pengertian. Dengan kata lain persepsi adalah tanggapan yang diberikan oleh seseorang dalam memahami gejala-gejala atau fenomena yang ada di lingkungan dengan menyimpulkan dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pancaindra.

Menurut Rahmat (2000:55) bahwa dalam menentukan persepsi seseorang dipengaruhi dua faktor yaitu fungsional dan struktural. Faktor fungsional merupakan faktor yang berasal dari kebutuhan dan pengalaman masa lalu. Jadi yang menentukan persepsi bukan bentuk atau jenis stimulusnya saja, melainkan karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus. Menurut Krech dan Crutchfield (dalam Rahmat, 2000:56) menyatakan faktor fungsional meliputi kebutuhan, kesiapan mental suasana emosi dan latar belakang sosial yang menentukan persepsi dari orang yang memberikan timbal balik dari proses persepsi tersebut. Faktor fungsional dapat diartikan sebagai orang yang mempersepsikan atau karakteristik pribadi individu akan mempengaruhi penafsiran suatu objek yang diamati. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi kebutuhan akan objek yang dipersepsikan, merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan seperti

keinginan, rangsangan dan tututan pribadi terhadap radikalisme. Suasana emosional adalah kondisi perasaan seseorang yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap objek yang diamati, baik itu perasaan senang maupun tidak senang terhadap objek yang di amati dan yang berkaitan dengan objek. Kesiapan mental adalah kesanggupan penyesuaian diri yang berkaitan dengan kondisi psikologi terhadap hubungan sosial yang meliputi usia dan sumber daya manusia. Latar belakang adalah lingkungan sekitar yang mendukung atau tidak pribadi dalam mempersepsikan objek yang dapat mempengaruhi penafsiran terhadap objek.

Faktor struktural merupakan faktor yang berasal dari sifat stimulus dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf dan identitas individu yang menjadi objek persepsi atau faktor yang berasal dari objek. Berdasarkan Robbins (2002:15) karakteristik dari objek yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan, meliputi gerakan, bunyi, latar belakang objek, dan kedekatan karakteristik dari objek akan diamati. Faktor struktural dapat diartikan sebagai karakteristik objek yang diamati dapat mempengaruhi persepsi meliputi sifat gerakan objek, gerakan objek yang sering dilakukan, faktor yang melatarbelakangi objek dampak yang ditimbulkan objek yang diteliti.

Menurut Robbins (2002:14) bentuk persepsi ada dua yaitu Persepsi positif dan persepsi negative, persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu obyek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari obyek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena kepuasan individu terhadap obyek yang menjadi sumber persepsinya, pengetahuan individu, serta pengalaman individu terhadap obyek yang dipersepsikan. Persepsi negatif merupakan penilaian individu terhadap suatu obyek yang dipersepsikan dengan pandangan negatif atau tidak sesuai dari aturan yang ada. Penyebab munculnya persepsi negatif seseorang dapat muncul karena ketidakpuasan individu terhadap obyek yang menjadi sumber persepsi, ketidaktahuan individu serta tidak mempunyai pengalaman individu terhadap obyek yang dipersepsikan dan sebaliknya.

Jadi secara umum persepsi dapat dibedakan menjadi persepsi positif dan persepsi negatif. Hal ini berkaitan dengan pribadi yang dimiliki setiap individu berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap individu memiliki persepsi yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya karena menerima suatu stimulus, kemampuan setiap individu tidak sama. Ada yang sesuai dengan pribadi individu adapula yang tidak sesuai dengan pribadi individu.

Teori Persepsi Burner

Berdasarkan Burner (dalam Sarwono, 2015:89) menyatakan bahwa persepsi adalah proses pengkategorisasian. Organisme dirangsang oleh suatu masukan tertentu (objek-objek di luar, peristiwa, dan lain-lain) dan organisme itu berespon dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori (golongan) objek-objek atau peristiwa-peristiwa. Proses menghubungkan ini adalah proses aktif individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari kategori yang tepat sehingga individu dapat mengenali atau memberi arti pada masukan tersebut. Dengan demikian persepsi juga bersifat inferensial (menarik kesimpulan).

Berdasarkan Burner (dalam Sarwono, 2015:89) mengatakan bahwa persepsi terdapat variasi yang dapat dipercaya. Sehingga persepsi menuntut suatu pengambilan keputusan. Keputusan menentukan kategori dan kategori menentukan arti. Selanjutnya, keputusan yang satu menyebabkan harus di buat keputusan yang berikutnya dan berikutnya dan seterusnya hingga terjadi penyempitan kategori objek yang dipersepsikan mendapatkan tempat yang tepat dalam sistem kategori seseorang. Dari pernyataan Burner tersebut persepsi dapat diartikan sebagai proses pengkategorisasian yang bervariasi atau bermacam-macam pada objek atau stimulus untuk memperoleh arti atau kesimpulan dengan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan persepsi menurut Bruner (dalam Sarwono, 2015:89) ada empat tahap pengambilan keputusan yaitu kategoris primitif, mencari tanda (*cue search*), konfirmasi dan konfirmasi tuntas.

Berdasarkan teori yang dijelaskan di atas, dalam hal ini guru PPKn melakukan proses pengkategorisasian melalui tanda-tanda yang diberikan oleh gerakan radikal atau indikator dari radikaalisme untuk menentukan penilaian atau menentukan keputusan tentang radikalisme di Indonesia. Guru PPKn dapat menentukan radikalisme di Indonesia melalui proses pengamatan, pengisolasian dan satu tanda-tanda yang memiliki ciri-ciri khusus, persepsi guru PPKn dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang ditentukan yaitu apakah guru PPKn memiliki persepsi guru PPKn negatif atau positif terhadap radikalisme di Indonesia.

Radikalisme

Radikalisme berasal dari bahasa latin *radix*, yang artinya akar, pangkal dan bagian bawah, atau bisa juga secara menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Sedangkan secara termonologi radikalisme adalah aliran atau faham yang radikal terhadap tatanan politik, paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara. Untuk mendefinisikan radikalisme Jainuri

(2015:4-5) melihat dari beberapa sudut pandang yaitu: pertama, radikalisme pemikiran yang didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai paling benar dan menganggap yang lain salah dan bersifat tertutup dan tidak menerima pemikiran lain selain yang dimilikinya. Kedua, radikalisme tindakan atau gerakan yang didasarkan pada tindakan atau gerakan aksi ekstrem yang harus dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan seperti dalam politik contohnya tindakan makar, revolusi, demonstrasi dan protes sosial yang anarkis. Berdasarkan Kartodirdjo (1985:38), radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.

Radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Sedangkan dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasi individu terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya, perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai atau kekerasan (Rubaidi, 2007:33).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki perubahan pergantian terhadap suatu pemerintahan di masyarakat akibat dari gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama dengan cara kekerasan.

Indikator radikalisme merujuk pada konseptual radikalisme dari dua lembaga yaitu, pertama, Lazuardi Biru yaitu organisasi yang lahir atas bentuk keprihatinan akan fenomena kekerasan yang terjadi dengan mengatasnamakan agama turut melibatkan anak-anak muda negeri ini. Kedua, SETARA *Institute* merupakan lembaga atas dasar perhimpunan individu/perorangan yang didekasikan bagi pencapaian cita-cita setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia (Yudha, 2012 :142-143). Dari tiga lembaga tersebut melakukan penelitian dari perspektif radikalisme agama. Berdasarkan Lazuardi Biru menyebutkan indikator radikalisme adalah tindakan radikalisme, sikap radikalisme, jihadisme, agenda Islami, dukungan terhadap organisasi Islami, keanggotaan terhadap organisasi Islami, alienasi dan deprivasi, intoleransi terhadap non muslim, perasaan tidak aman dan perasaan

terancam. Berdasarkan SETARA *institute*, dalam mengidentifikasi indikator radikalisme dengan elaborasi konsep mengenai radikalisme yang terdiri atas dimensi isu: intoleransi, konflik dan kekerasan, Pancasila, terorisme, hukum sekuler & syariat Islam dan Demokrasi dan Khilafah (Yudha, 2012:142-143).

Dari berbagai indikator-indikator radikalisme tersebut maka dapat dalam penelitian ini indikator yang digunakan yaitu keberadaan radikalisme, tindakan radikal, sikap radikal, dukungan terhadap radikalisme merupakan upaya dalam memperoleh anggota dan kesediaan dalam membantu gerakan radikal dan konsensus kebangsaan diubah dengan konsep Islam dengan cara mengganti ideologi Pancasila dengan Islam versi mereka. mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dengan hukum Islam, mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Khilafah dan perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika) itu sebagai kehancuran seperti mudah buruk sangka kepada orang lain di luar golongan bahkan mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat dengan mereka.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbung, 1995:3). Salah satu keuntungan dari penelitian survei dapat membuat generalisasi untuk populasi besar. Adapun proses penelitian survei merupakan kegiatan ilmiah yang sistematis untuk mengungkapkan suatu fenomena atau gejala sosial tertentu (Iskandar, 2012:22)

Berdasarkan Sugiyono (2011:6) penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), dengan memberikan perlakuan dalam pengumpulan data seperti mengedarkan kuesioner atau wawancara terstruktur dan sebagainya. Jadi penelitian survei adalah kegiatan ilmiah yang sistematis untuk mengungkapkan suatu fenomena atau gejala sosial tertentu dengan pengumpulan informasi dari populasi besar maupun kecil dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Lokasi penelitian di Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Lamongan baik swasta atau negeri. Sampel dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar PPKn dengan jumlah 93 guru. Variabel dalam penelitian ini ada persepsi guru PPKn tentang radikalisme. Definisi operasional variabel adalah persepsi guru PPKn tentang radikalisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat guru PPKn tentang paham yang menghendaki perubahan sosial dan politik dalam negara Indonesia

dengan konsep agama Islam yang meliputi tindakan dan pemikiran dengan mengatasnamakan agama. Agama dijadikan sebagai tameng untuk tindakan radikalisme, sikap radikalisme, dukungan radikalisme, perubahan konsensus kebangsaan dengan konsep Islam.

Teknik pengumpulan data berupa angket. Angket yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan dua jenis angket yaitu angket tertutup dan semi terbuka. Angket yang bersifat tertutup, pada item pernyataan membutuhkan dua jawaban setuju atau tidak setuju dari responden yang digunakan untuk mencari data persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan. Sedangkan untuk mendapatkan data faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menggunakan angket semi terbuka, pada item pertanyaan atau pernyataan membutuhkan dua jawaban ya atau tidak serta ada uraian dari responden yang memberikan alasan sebagai penguat dari jawaban tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dari hasil survei sering dilaporkan dalam bentuk tabulasi frekuensi dan persentase. Statistik deskriptif ini adalah angka yang mengikhtisarkan data dengan prosentase. Penggunaan teknik prosentase, untuk mengetahui persepsi guru PPKn wilayah Lamongan tentang radikalisme. Pemilihan teknik ini disesuaikan dengan jenis penelitian untuk mengungkap seberapa besar presentase hasil penelitian. Adapun rumus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan: P = hasil akhir dalam persentase

n = Nilai yang diperoleh dalam angket

N = Jumlah responden

Data yang diperoleh melalui angket perlu dikuantitatifkan terlebih dahulu dengan memberikan angka untuk item-item pernyataan dengan skala *guttman*. Responden akan diminta untuk menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap isi pernyataan dalam dua kategori jawaban dengan menentukan skor terhadap angket dan setiap nomor terdiri atas dua jawaban dengan skor berbeda pada tiap pilihan. Untuk pernyataan atau pertanyaan positif dengan jawaban mendapatkan skor 1 apabila menjawab setuju atau ya dan 0 apabila menjawab tidak setuju atau tidak. Skor pada pernyataan atau pertanyaan negatif mendapatkan skor 1 untuk menjawab tidak setuju atau tidak dan 0 untuk menjawab setuju atau ya.

Setelah menentukan skor dari angket, maka diperlukan penentuan kriteria penilaian. Adapun kriteria penilaian ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Persepsi Guru PPKn tentang Radikalisme di Indonesia

| Interval | Kategori |
|----------|--------------------------------|
| 25 – 55 | Persepsi Negatif/ tidak setuju |
| 0 – 24 | Persepsi Positif/ setuju |

Untuk menghitung kriteria penilaian faktor diketahui data sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Faktor yang mempengaruhi Persepsi Guru PPKn

| Interval | Kategori |
|----------|-------------------|
| 9-15 | Berpengaruh |
| 0-8 | Tidak berpengaruh |

Setelah ditentukan kategori penilaian selanjutnya yaitu menganalisis skor pada tiap-tiap indikator. Dari indikator-indikator yang telah dianalisis tersebut akan dicari rata-rata skor. Adapun kriteria penilaian tiap indikator ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Persepsi Guru PPKn Pada Tiap Indikator Radikalisme

| Interval | Kategori |
|----------|--------------------------------|
| 48 – 95 | Persepsi Negatif/ tidak setuju |
| 0 – 47 | Persepsi Positif/ setuju |

Untuk kriteria penilaian tiap faktor yang paling berpengaruh dapat dilihat dari skor rata-rata dari tiap faktor kemudian faktor yang memiliki skor rata-rata yang paling tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Guru PPKn SMA Wilayah Lamongan tentang Radikalisme Di Indonesia

Persepsi adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu yang dimulai dari indera/penglihatan yang menjadikan stimulus atau rangsangan yang dialami sebelumnya sebagai dasar bagi orang tersebut untuk bertindak baik disadari atau tidak disadari. Persepsi juga dapat diartikan sebagai pemberian tanggapan, arti, gambaran atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat didengar, atau dirasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap, pendapat dan tingkah laku atau bisa disebut perilaku individu.

Penelitian ini telah dilakukan untuk menganalisis persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia yang berupa pendapat guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari 5 indikator yaitu keberadaan radikalisme, sikap radikal, tindakan radikal, konsensus kebangsaan diubah dengan konsep Islam.

Keberadaan Radikalisme

Pada indikator keberadaan radikalisme di Indonesia dapat dilihat dari pernyataan bahwa, guru PPKn menyatakan

setuju mengenai radikalisme sudah ada sejak zaman kolonial Belanda sebanyak 76 guru atau 81,72% dan menyatakan tidak setuju sebanyak 17 guru PPKn atau 18,28%. Guru PPKn menyatakan ketidaksetujuan mengenai radikalisme berkembang pesat di Indonesia sebanyak 60 guru atau dipersenkan menjadi 64,52% dan menyatakan setuju sebanyak 33 guru PPKn atau 35,48%. Guru PPKn menyatakan ketidaksetujuan mengenai radikalisme ingin menguasai negara sebanyak 71 guru atau dipersenkan menjadi 76,34% dan menyatakan setuju sebanyak 22 guru PPKn atau 23,66%. Guru PPKn menyatakan setuju bahwa di Indonesia terdapat individu atau kelompok radikal yang mengatasnamakan agama sebanyak 77 guru atau dipersenkan menjadi 82,80% dan menyatakan tidak setuju sebanyak 16 guru PPKn atau 17,20%. Guru PPKn menyatakan setuju bahwa radikalisme di Indonesia menggunakan ideologi agama sebagai senjata publik sebanyak 63 guru atau dipersenkan menjadi 67,74% dan menyatakan tidak setuju sebanyak 30 guru PPKn atau 32,26%. Berdasarkan data tersebut diperoleh skor rata-rata 76,94 yang dapat dikategorikan persepsi negatif.

Guru PPKn mengetahui faktor yang mendorong radikalisme di Indonesia yaitu, guru PPKn menyatakan setuju bahwa kepentingan politik menjadi faktor mendorong munculnya radikalisme sebanyak 70 guru atau dipersenkan menjadi 75,27% dan guru PPKn menyatakan tidak setuju sebanyak 23 guru atau 24,73%. Guru PPKn menyatakan setuju bahwa kepentingan ekonomi menjadi faktor yang mendorong radikalisme sebanyak 52 guru atau dipersenkan menjadi 55,91% dan guru PPKn menyatakan tidak setuju sebanyak 41 atau 44,09% guru. Guru PPKn menyatakan setuju bahwa kondisi psikologi pelaku menjadi faktor yang mendorong munculnya radikalisme di Indonesia sebanyak 58 guru atau dipersenkan menjadi 62,37% dan guru PPKn menyatakan tidak setuju sebanyak 35 guru atau 37,63%. Guru PPKn menyatakan setuju bahwa kepentingan agama menjadi faktor yang mendorong munculnya radikalisme di Indonesia sebanyak 81 guru atau dipersenkan menjadi 87,10% dan guru PPKn menyatakan tidak setuju sebanyak 12 guru atau 12,90%. Guru PPKn menyatakan setuju bahwa pemahaman agama secara tekstual tanpa memahami kandungan dan makna sehingga mengakibatkan kerancuan konsep menjadi faktor yang mendorong radikalisme sebanyak 83 guru atau dipersenkan menjadi 89,25% dan guru PPKn menyatakan tidak setuju sebanyak 10 guru atau 10,75%. Berdasarkan data tersebut guru PPKn mengetahui bahwa faktor yang mendorong radikalisme adalah pemahaman agama yang sempit dan kepentingan agama yang paling berpengaruh munculnya radikalisme daripada faktor kepentingan politik, kondisi psikologi dan ekonomi.

Keberadaan radikalisme dapat menimbulkan dampak bagi negara. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan guru PPKn yaitu, guru PPKn menyatakan tidak setuju terhadap radikalisme di Indonesia karena memberikan dampak kepada warga negara dan stabilitas nasional. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari 88 guru PPKn atau 95,70% guru PPKn menyatakan tidak setuju karena menimbulkan rasa tidak aman bagi warga negara dan guru PPKn menyatakan tidak setuju sebanyak 4 guru PPKn atau 4,30%. Untuk dampak bagi stabilitas nasional dapat diketahui dari 90 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 96,77% guru menyatakan tidak setuju dengan radikalisme karena dapat memberikan perasaan terancam dalam stabilitas nasional dan 3,23% guru PPKn menyatakan setuju.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator keberadaan radikalisme diperoleh skor rata-rata 72,42, perolehan tersebut dapat dikategorikan persepsi negatif. Artinya guru PPKn menolak radikalisme tumbuh di Indonesia, meskipun sudah ada sejak zaman kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka sampai proses kemerdekaan Negara Indonesia. Kemunculan radikalisme didorong oleh faktor politik, ekonomi, dan psikologi. Faktor agama yang dijadikan sebagai tameng untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah dari faktor tersebut.

Dukungan terhadap Radikalisme

Dukungan terhadap radikalisme adalah upaya mencari dukungan radikalisme, guru PPKn memberikan pendapat mengenai hal tersebut yaitu, guru PPKn menyatakan tidak setuju dengan upaya yang dilakukan oleh gerakan radikal untuk mencari dukungan dengan alasan Jihad. Hal tersebut dilihat dari sebanyak 80 guru atau dipersenkan menjadi 86,02% guru PPKn menyatakan tidak setuju dengan perintah untuk membela agama harus dilaksanakan dengan fisik dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 13 guru atau 13,98%. Selain itu, sebanyak 84 guru atau 90,32% guru PPKn menyatakan tidak setuju mengenai memerangi orang berbeda keyakinan merupakan kebaikan demi membela agama dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 9 guru atau 9,68%.

Selain dengan memberikan alasan jihad dengan pemaknaan yang salah, gerakan radikal juga memberikan pemaknaan doktrin ajaran agama yang sepotong-potong dan hadiah atau imbalan. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan guru PPKn yaitu, guru PPKn menyatakan tidak setuju dengan upaya yang dilakukan gerakan radikal untuk mencari dukungan dengan memberi imbalan atau hadiah kepada sasaran yang akan menjadi anggota sebanyak 85 guru atau dipersenkan menjadi 92,47% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 9

guru atau 9,68%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju dengan upaya yang dilakukan gerakan radikal untuk mencari dukungan dengan memberikan doktrin dan ajaran Islam dengan hidup kesalehan untuk memperkuat gerakan radikal sebanyak 88 guru atau dipersenkan menjadi 94,62% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 5 guru atau 5,38%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju bahwa umat beragama di Indonesia mengikuti paham radikal sebanyak 81 guru atau dipersenkan menjadi 87,10% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 12 guru atau 12,90%.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dukungan terhadap radikalisme diperoleh skor rata-rata 83,60, perolehan tersebut dapat di kategorikan persepsi negatif. Artinya guru PPKn tidak setuju dengan upaya mencari dukungan radikalisme yang dilakukan oleh gerakan radikal dalam memahami dan memaknai nilai-nilai doktrin dan ajaran Islam yang menyimpang, salah satunya yaitu konsep jihad yang merupakan ajaran dan doktrin yang disalah fahami oleh gerakan radikal. Selain upaya tersebut gerakan radikal juga memberikan pemahaman ajaran agama dan keyakinan ang sepotong-potong, memberikan cara hidup kesalehan, memberikan motivasi dan menjanjikan mendapat hadiah atau imbalan.

Tindakan Radikal

Guru PPKn menyatakan tidak setuju yang dilakukan oleh kelompok radikal karena menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan dan pemahaman sebanyak 80 guru atau dipersenkan menjadi 86,02% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 13 guru atau 13,98%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju yang dilakukan oleh kelompok radikal karena cara yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah gerakan radikal menggunakan tindakan kekerasan lebih dahulu daripada jalan perdamaian sebanyak 71 guru atau dipersenkan menjadi 76,34% dan guru PPKn yang menyatakan setuju sebanyak 22 guru atau 23,66%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju yang dilakukan oleh sekelompok radikal karena melakukan bom bunuh diri bagi para pelaku radikal sebanyak 89 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 95,70% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 4 guru atau 4,30%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju yang dilakukan oleh kelompok radikal karena penggunaan senjata untuk menimbulkan rasa takut dalam mencapai tujuan sebanyak 87 guru atau dipersenkan menjadi 93,55% dan guru PPKn yang menyatakan setuju sebanyak 6 guru atau 6,45%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa guru PPKn tidak setuju dengan tindakan radikal karena menggunakan kekerasan diperoleh skor rata-rata 81,75. Hasil tersebut dapat dikategorikan presepsi negatif, artinya guru PPKn tidak setuju dengan gerakan radikal karena menggunakan

kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan dalam menyelesaikan masalah.

Tindakan radikal yang dilakukan kelompok radikal dengan cara menggulingkan pemerintah yang sah. Hal tersebut guru PPKn memberikan pendapat yaitu: Guru PPKn menyatakan tidak setuju yang dilakukan oleh kelompok radikal karena benci pada pemerintah Indonesia yang tidak jalankan syariat Islam sebanyak 81 guru atau dipersepsikan menjadi 87,10% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 12 guru atau 12,90%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju yang dilakukan oleh kelompok radikal karena melakukan perubahan dengan menggulingkan pemerintah yang sah sebanyak 86 guru atau dipersenkan sebanyak 92,47% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 7 guru atau 7,53%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju yang dilakukan oleh kelompok radikal karena melakukan demonstrasi yang tidak sesuai dengan aturan sebanyak 87 guru atau dipersenatsekan menjadi 93,55% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 6 guru atau 6,45%. Berdasarkan data tersebut diperoleh skor rata-rata 84,67. Hasil tersebut dapat dikategorikan presepsi negatif, artinya guru PPKn tidak setuju dengan gerakan radikal karena tidak percaya dengan pemerintah maka melakukan penggulingan pemerintah yang sah.

Kelompok radikal menganggap bahwa apa yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada kelompoknya dianggap sesat sehingga melakukan pemberantasan aliran sesat dan maksiat yang dilakukan oleh gerakan radikal. Hal tersebut guru PPKn memberikan pendapat yaitu: Guru PPKn menyatakan tidak setuju yang dilakukan kelompok radikal karena melakukan penyegelan dan perusakan rumah ibadah yang bermasalah sebanyak 85 guru atau dipersepsikan menjadi 91,40% dan guru PPKn yang menyatakan setuju sebanyak 8 guru atau 8,60%. Guru PPKn menyatakan yang tidak setuju yang dilakukan oleh kelompok radikal karena melakukan perusakan rumah dan fasilitas aggota aliran keagamaan yang sesat sebanyak 85 guru atau dipersepsikan menjadi 91,40% dan guru PPKn yang menyatakan setuju sebanyak 8 guru atau 8,60%. Guru PPKn yang tidak setuju yang dilakukan oleh kelompok radikal karena melakukan penyegelan dan pengrusakan tempat hiburan malam sebanyak 66 guru atau dipersepsikan menjadi 70,97% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 27 guru atau 29,03%. Guru PPKn yang tidak setuju yang dilakukan oleh kelompok radikal karena melakukan pembelaan dengan senjata demi agama sebanyak 70 guru atau dipersepsikan menjadi 75,27% dan guru PPKn yang menyatakan setuju sebanyak 23 guru atau 24,73%. Berdasarkan pernyataan tersebut diperoleh skor rata-rata 76,50. Hasil tersebut dapat dikategorikan presepsi negatif, artinya guru PPKn menyatakan tidak setuju dengan pemberantasan aliran

sesat dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok radikal dengan cara kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindakan radikal diperoleh skor rata-rata 80,64. Hasil tersebut dapat dikategorikan persepsi negatif, artinya guru PPKn tidak setuju dengan tindakan radikal karena menggunakan kekerasan dan menggulingkan pemerintah yang sah. Radikalisme merupakan sebuah paham yang menginginkan suatu perubahan sampai ke akarnya dengan cepat. Perubahan tersebut memberikan reaksi penerimaan dengan senang dan penolakan dengan keras. Gerakan radikal dalam menyelesaikan masalah dengan kekerasan, menggunakan senjata dalam memerangi agama lain, selain itu melakukan bom bunuh diri, menggulingkan pemerintah yang sah sebagai wujud kekecewaan kepada pemerintah dan kegagalan elit politik umat Islam serta melakukan penyegehan, pengrusakan rumah ibadah yang bermasalah, tempat hiburan malam, melakukan pembelaan dengan senjata terhadap umat Islam dari ancaman agama lain. Semua tindakan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap suatu perubahan yang dilakukan gerakan radikal.

Sikap Radikal

Kelompok radikal memiliki sikap tertutup dan fanatik, dapat dibuktikan dari persepsi guru PPKn mengenai sikap radikal yaitu: guru PPKn menyatakan tidak setuju dengan kelompok radikal karena memiliki sikap tertutup dengan orang lain maupun kelompok lain sebanyak 84 guru atau dipersepsikan menjadi 90,32% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 9 atau 9,68%. Guru PPKn yang tidak setuju dengan kelompok radikal karena buruk sangka kepada orang lain beda keyakinan dan pemikiran sebanyak 86 guru atau dipersepsikan menjadi 92,47% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 2 guru atau 2,15%. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh skor rata-rata 87. Hasil tersebut dapat dikategorikan persepsi negatif, artinya guru PPKn tidak setuju dengan radikalisme karena kelompok radikal memiliki sifat tertutup dengan orang maupun kelompok lain.

Kelompok radikal memiliki sikap yang tertutup selain itu kelompok radikal memiliki fanatik yang berlebihan, dapat dibuktikan dari persepsi guru PPKn mengenai sikap radikal. Guru PPKn tidak setuju mengenai fanatik pada keimanan sebanyak 88 guru atau dipersepsikan menjadi 94,62% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 5 guru atau 5,38%. Guru PPKn tidak setuju mengenai fanatik pada organisasi sebanyak 91 guru atau dipersepsikan menjadi 97,85% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 2 guru atau 2,15%. Berdasarkan data tersebut diperoleh skor rata-rata 89,5 atau dipresentasikan menjadi 96,24%. Hal tersebut

dapat dikategorikan persepsi negatif, artinya guru tidak setuju terhadap radikalisme karena pelaku radikal memiliki sikap fanatik yang berlebihan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap radikal diperoleh skor rata-rata 88, skor tersebut termasuk dalam kategori persepsi negatif. Artinya guru PPKn tidak setuju sikap radikal karena sikap yang dimiliki individu dalam gerakan radikal memiliki sifat tertutup dengan orang lain diluar kelompoknya. Gerakan radikal merasa bahwa dirinya maupun kelompoknya paling benar dan yang lainnya salah. Hal tersebut menjadikan mudah berprasangka buruk kepada orang, kelompok dan agama lain, sehingga pelaku radikal mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sama dengan keyakinan dan pemikiran karena fanatik yang berlebihan dalam keimanan, pendapat dan kelompok.

Konsensus Kebangsaan Diubah dengan Konsep Islam

Kelompok radikal menginginkan perubahan ideologi Pancasila dengan Islam versi kelompok radikal. Hal tersebut guru PPKn memberikan tanggapan tidak setuju apabila nilai-nilai Pancasila tidak relevan dengan bangsa Indonesia saat ini sebanyak 86 guru atau dipersenkan menjadi 92,47% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 7 guru atau 7,53%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju apabila Ideologi Pancasila diganti dengan ideologi agama sebanyak 86 guru atau dipersenkan menjadi 92,47% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 7 guru atau 7,53%. Berdasarkan data tersebut diperoleh skor rata-rata 86. Skor tersebut dapat dikategorikan persepsi negatif, artinya guru PPKn tidak setuju ideologi Pancasila diganti dengan ideologi lain dan sampai kapanpun Pancasila tetap relevan.

Kelompok radikal menginginkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dengan hukum Islam. Hal tersebut guru PPKn memberikan tanggapan tidak setuju dengan perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dengan hukum Islam. Dibuktikan sebanyak 81 guru atau 87,10% guru PPKn menyatakan tidak setuju apabila hukum agama lebih adil daripada hukum negara, karena itu Indonesia harus menggunakan hukum agama dan guru PPKn yang mentakan setuju sebanyak 12 guru atau 12,90%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju dengan keinginan kelompok radikal mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia secara keseluruhan, sebanyak 78 guru atau dipesepsikan menjadi 83,87% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 15 guru atau 16,13%. Hasil penelitian tersebut diperoleh skor rata-rata 79,50. Skor tersebut dapat dikategorikan persepsi negatif, artinya guru PPKn tidak setuju Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar

tertulis diubah dengan hukum Islam, meskipun hukum agama lebih adil, karena dasar hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kelompok radikal menginginkan perubahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Khilafah. Hal tersebut guru PPKn memberikan tanggapan tidak setuju mengenai perubahan negara kesatuan menjadi negara agama, sebanyak 95 guru atau 95,70% dan guru PPKn menyatakan tidak setuju dan guru PPKn yang menyatakan setuju sebanyak 4 guru atau 4,30%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju dengan pembentukan negara Islam dalam negara Indonesia sesuai dengan aturan Islam sebanyak 89 guru atau dipersenkan menjadi 95,70% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 4 guru atau 4,30%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju dengan pernyataan dari kelompok radikal mengenai demokrasi tidak cocok diterapkan di Indonesia karena produk barat sebanyak 85 guru atau dipersenkan menjadi 91,40% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 8 guru atau 8,60%. Guru PPKn menyatakan tidak setuju untuk mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim sebanyak 75 guru atau dipersenkan menjadi 80,65% dan guru PPKn menyatakan setuju sebanyak 18 guru atau 19,35%. Berdasarkan data tersebut diperoleh skor rata-rata 84,50, skor tersebut dapat dikategorikan persepsi negatif, artinya guru PPKn tidak setuju Negara Kesatuan Republik Indonesia diganti dengan Khilafah.

Kelompok radikal menyatakan bahwa keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) itu sebagai kehancuran karena tidak mempunyai satu dasar yang jelas seperti agama Islam, tetapi di Indonesia mempunyai dasar negara yang toleransi, multikultural, multi agama, sehingga semua perbedaan baik itu suku, budaya dan agama bisa diterima asalkan tidak merusak jati diri bangsa Indonesia. Hal tersebut guru PPKn memberikan tanggapan tidak setuju dengan pernyataan keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) itu sebagai kehancuran keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika). Dibuktikan dengan tanggapan guru PPKn yang menyatakan setuju bahwa keanekaragaman dapat memperkuat kesatuan sebanyak 88 guru atau dipersenkan menjadi 94,62% dan menyatakan tidak setuju sebanyak 5 guru atau 5,38%. Selain itu gerakan radikal intoleransi terhadap budaya dan agama, sehingga 92 guru atau dipersenkan 98,92% guru PPKn menyatakan tidak setuju dan 1 guru atau 1,08% menyatakan setuju. Hal tersebut menjadikan kelompok radikal menghilangkan warisan budaya yang tidak sesuai dengan aturan agama, sehingga 83 guru atau 89,25% guru PPKn menyatakan tidak setuju dan 10 guru PPKn atau 10,75% menyatakan setuju. Kelompok radikal juga menganggap bahwa menikah dengan orang yang berbeda suku dan budaya, sehingga

83 guru atau dipersenkan menjadi 89,25% guru PPKn menyatakan setuju dan 10 guru PPKn atau 10,75% menyatakan tidak setuju. Kelompok radikal menginginkan pemimpin negara harus orang yang seiman, sehingga 57 guru atau 61,90% guru PPKn menyatakan tidak setuju dan 36 guru atau 38,71% menyatakan setuju. Selain itu kelompok radikal menginginkan bidang politik dan ekonomi di Indonesia harus dikuasai oleh agama Islam, hal tersebut guru PPKn menyatakan tidak setuju mengenai umat Islam menjadi penguasa dalam bidang politik sebanyak 66 guru atau 70,98% dan guru PPKn menyatakan tidak setuju sebanyak 27 atau 29,03%. Begitu juga dalam bidang ekonomi, guru PPKn menyatakan tidak setuju mengenai umat Islam menjadi penguasa dalam bidang ekonomi sebanyak 60 guru atau dipersenkan menjadi 64,52% dan 33 guru PPKn menyatakan tidak setuju sebanyak 33 guru atau 35,48%. Berdasarkan data tersebut diperoleh skor rata-rata 75,57, skor tersebut dapat dikategorikan persepsi negatif, artinya guru PPKn menyatakan tidak setuju keberagaman sebagai kehancuran.

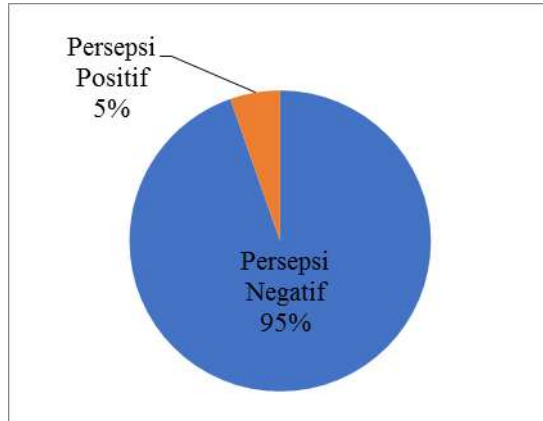
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggantian konsensus kebangsaan terhadap konsep Islam diperoleh skor rata-rata 79,87, skor tersebut termasuk dalam kategori persepsi negatif, artinya guru PPKn tidak setuju terhadap konsensus kebangsaan diubah dengan konsep Islam karena gerakan radikal menginginkan pembentukan negara Islam yang berideologi Islam, Apabila Islam dijadikan sebagai ideologi di Indonesia bagaimana dengan agama Kristen, Hindu, Budha, dan agama lainnya yang diakui di Indonesia. Padahal mempunyai hak hidup di Indonesia dan masing-masing agama tersebut pernah berjuang dalam proses kemerdekaan dan ikut serta dalam membentuk negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Pembentukan negara agama di Indonesia merupakan bentuk egoisme dan politik atasnama agama. Selain itu Islam merupakan agama yang damai, santun, ramah dan toleran maka mempunyai kewajiban menghargai agama lain jika Islam ingin dihargai dan dalam Islam tidak diajarkan memaksakan kehendak kepada agama lain.

Berdasarkan hasil penelitian dari 93 guru PPKn SMA wilayah Lamongan dalam mempersepsikan radikalisme dikelompokkan pada kriteria persepsi tentang radikalisme yang telah ditentukan, dapat diketahui pada table 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Pengelompokkan Persepsi Guru PPKn tentang Radikalisme di Indonesia

| Skor | Kriteria Persepsi | Frekuensi |
|--------|--------------------------------|-----------|
| 29–55 | Persepsi Negatif/ tidak setuju | 88 |
| 0 – 28 | Persepsi Positif/ setuju | 5 |

Hasil pengelompokan kriteria persepsi tentang radikalisme di Indonesia yang dilakukan guru PPKn SMA wilayah Lamongan, dimasukkan ke dalam rumus persentase. Ditinjau dari rumus persentase di atas, dari 100% jumlah keseluruhan diketahui bahwa persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia mempunyai persepsi negatif sebesar 94,62% dan persepsi positif sebesar 5,38%. Hasil tersebut dapat dilihat melalui grafik 1 sebagai berikut:



Grafik 1. Persepsi Guru PPKn SMA Wilayah Lamongan tentang Radikalisme di Indonesia

Berdasarkan grafik 1 diketahui persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia mayoritas tidak setuju. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil persentase 94,62% persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan terhadap radikalisme di Indonesia memiliki kriteria persepsi negatif. Artinya guru PPKn SMA wilayah Lamongan tidak setuju dengan radikalisme di Indonesia karena gerakan radikal mengatasnamakan agama Islam, tindakan radikal yang keras, sikap radikal yang tertutup dan pembentukan negara Islam di Indonesia tidak sesuai dengan esensi Pancasila, Konstitusi dan semboyan Negara.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Guru PPKn SMA Di Wilayah Lamongan Tentang Radikalisme di Indonesia

Persepsi memiliki keterkaitan dengan aspek kognitif karena persepsi merupakan proses untuk menanggapi suatu objek tertentu dengan mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus inderawi sehingga didapat suatu makna. Pada hakikatnya tanggapan seorang guru dalam mempersepsikan radikalisme di Indonesia tentu ada beberapa hal yang melatarbelakangi sehingga persepsi antara guru memiliki perbedaan dalam hal mempersepsikan suatu objek sosial. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi guru PPKn tentang radikalisme adalah

Faktor Fungsional atau Pribadi Guru PPKn

Faktor fungsional dapat disebut faktor personal atau perseptor, merupakan pengaruh dalam diri individu yang mengadakan persepsi seperti kebutuhan guru PPKn terhadap radikalisme, perasaan senang dengan PPKn dan perkembangan nasional, kesanggupan guru PPKn dalam menambah wawasan tentang radikalisme dan latar belakang sosial guru PPKn. Adapun faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi guru PPKn dapat dijelaskan sebagai berikut

1). Kebutuhan terhadap Radikalisme

Merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan seperti keinginan, rangsangan dan tuntutan. Persepsi seseorang dapat dipengaruhi dalam kebutuhan dalam aktivitas sehari-harinya.

Pada aspek keinginan diperoleh sebanyak 91 guru PPKn atau persentase 97,85% menyatakan tidak mempunyai keinginan masuk dalam gerakan radikal karena memiliki dampak negative bagi diri sendiri maupun negara, radikalisme menyimpang dari esensi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta dapat menghancurkan NKRI. Sebanyak 2 guru PPKn atau persentase 2,15% guru PPKn menginginkan masuk dalam gerakan radikal karena radikalisme itu perlu bagi masyarakat luas, karena sifat umat Islam itu harus bermacam-macam sebagaimana yang dimiliki sahabat Nabi yaitu Khulafaurrosidin.

Data tersebut dapat dikatakan bahwa guru PPKn tidak mempunyai keinginan masuk dalam gerakan radikal karena radikalisme memiliki dampak negatif, menyimpang dari esensi makna Pancasila, dan tidak disyariatkan agama apapun serta merasa kondisi negara Indonesia dalam keadaan stabil dan aman. Alasan tersebut dapat diketahui bahwa guru PPKn memiliki sikap kewarganegaraan dan tanggung jawab kewarganegaraan, sehingga tidak mempunyai keinginan untuk masuk dalam gerakan radikal.

Selain dari keinginan, guru PPKn mempersepsikan sesuatu karena terdapat rangsangan dari panca indra salah satunya yaitu melalui penglihatan mengenai radikalisme yang dapat mempengaruhi persepsi dengan cara melihat kelompok radikal. Hasil penelitian diperoleh bahwa yang melihat kelompok radikal sebanyak 89 guru PPKn atau 95,70% dengan menyebutkan, teroris, ISIS, PKI, GAM, HTI, FPI, Wahabi, Gafatar, dan Jamaah Islami sedangkan yang tidak melihat kelompok radikal sebanyak 4 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 4,30%.

Data tersebut diketahui bahwa guru PPKn mempersepsikan tentang radikalisme karena pernah melihat gerakan radikali. Guru PPKn harus mempunyai jiwa kepekaan sosial dan pengetahuan tentang kewarganegaraan sehingga dapat mempengaruhi

penalaran dan berpikir kritis dalam memberikan pendapat atau menanggapi sesuatu.

Selain dari aspek rangsangan terdapat pula tuntutan mengenai profesi menjadi guru PPKn juga berpengaruh dalam mempersepsikan radikalisme. Sebanyak 91 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 97,85%, guru PPKn mnnyetakan bahwa melihat radikalisme baik secara langsung maupun tidak. Dari jawaban tersebut guru PPKn memberikan alasan yaitu: guru PPKn menyatakan tugas guru PPKn adalah berusaha untuk mencapai tujuan PPKn dan bertanggung jawab dan mencapai cita-cita bangsa menjadikan generasia penerus bangsa menjadi warga negara yang cerdas dan baik dan sebanyak 2 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 2,15% menyatakan keberatan dalam menjalankan profesi.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme dipengaruhi oleh tuntutan profesi. Karena guru PPKn harus mempunyai kompetensi dalam membentuk nilai dan sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Sedangkan radikalismeitu bertentangan dengan tujuan PPKn yaitu untuk mengatasi radikalsime di Indonesia.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa ketiga aspek dalam sub indikator kebutuhan dapat mempengaruhi persepsi seseorang meskipun pada aspek rangsangan di peroleh lebih rendah dari unsur keinginan dan tuntutan tetap menunjukkan bahwa kebutuhan guru PPKn tidak sesuai radikalisme. Dibuktikan dengan diperoleh skor rata-rata 90,33. Artinya bahwa guru PPKn dalam mempersepsikan dipengaruhi oleh kebutuhan, di

Guru PPKn dalam menjalankan profesi merupakan kebutuhan dan tanggung jawabnya dalam memberikan contoh dan membentuk sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Sehingga persepsi guru PPKn tentang radikalisme memiliki persepsi negatif karena radikalisme tidak sesuai dengan kebutuhan guru PPKn.

2) Perasaan senang terhadap PPKn dan Perkembangan Nasional

Salah satu yang dapat mempengaruhi perasaan senang seseorang dapat dicapai ketika orang tersebut dalam keadaan nyaman dengan apa yang guru PPKn inginkan hingga nantinya menimbulkan perasaan senang sesuatu hal yang dapat menjadi suatu kebiasaan untuk mengasah kemampuan intelektual yang dimiliki. Hal mengenai perasaan senang terhadap rumpun sosial sehingga dapat menjadikannya paham akan tujuan PPKn.

Berdasarkan hasil penelitian pada perasaan senang diperoleh 91 guru PPKn atau 97,85% menyatakan perasaan senang terhadap pelajaran PPKn karena PPKn merupakan mata pelajaran yang melibatkan aspek teori,

praktik dan pengamatan langsungnya dalam kehidupan bermasyarakat, PPKn berisikan materi yang berkembang sesuai perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dapat mengetahui kondisi Indonesia. Dan cakupan PPKn yang luas karena berupa kajian dari beberapa ilmu yang berhubungan dengan PPKn sehingga banyak guru PPKn yang berasal studi sosial lainnya. Sedangkan 2 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 2,15% tidak senang dengan PPKn karena merupakan mata pelajaran yang sering menghafal baik itu sejarah, konstitusi struktur pemerintahan dan lain sebagainya.

Berdasarkan data tersebut diketahui seorang guru PPKn mempunyai perasaan senang di dalam dirinya. Dengan perasaan senang maka seseorang akan senantiasa menimbah ilmu dengan senang hati, ikhlas tanpa ada paksaan. Hal ini nantinya dapat menjadikan ilmu yang didapatkan dapat melekat sampai kapanpun.

Sub indikator kedua dari suasana emosi adalah kegemaran/hobi, kegemaran seseorang juga dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi kemampuan menanggapi sesuatu. Hasil penelitian di peroleh 82 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 88,17% menyatakan gemar dalam mengikuti perkembangan bangsa karena perlu mengontrol perkembangan kehidupan masyarakat luas dan perkembangan bangsa dan negara Indonesia termasuk berita tentang munculnya kelompok-kelompok radikal seperti, ISIS dan Gafatar yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Sedangkan 11 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 11,83% guru PPKn tidak memiliki kegemaran mengikuti isu nasional karena tidak mempunyai waktu luang.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebuah hobi yang positif pula bagi penggemarannya. Ketika seseorang guru PPKn yang sudah terbiasa bergelut dengan masalah sosial, maka menjadikannya sebagai alat pemicu untuk selalu mengikuti kabar perkembangan kehidupan masyarakat luas. Salah satu cara untuk mengetahui perkembangan pola kehidupan masyarakat ialah dengan memanfaatkan mengikuti berita yang berkembang dengan melalui media cetak atau media massa dan dapat dilakukan dengan cara diskusi.

Pada sub indikator perasaan senang terhadap PPKn dan kebutuhan guru PPKn terhadap radikalisme diperoleh 97,85% senang dengan PPKn dan 88,17% gemar mengikuti isu nasional. Data tersebut dapat diartikan bahwa guru PPKn SMA wilayah Lamongan dalam mempersepsikan radikalisme dipengaruhi oleh suasana emosional meliputi senang dengan PPKn dan kegemaran mengikuti isu. Meskipun pada aspek kegemaran mengikuti isu nasional lebih rendah dibandingkan dengan senang terhadap PPKn. Namun, kedua aspek tersebut dapat mempengaruhi persepsi guru PPKn terhadap radikalisme. Dibuktikan dnegan perolahan hasil

penelitian yang telah dilakukan diperoleh skor rata-rata 86,5. Artinya guru PPKn saat mempersepsikan dipengaruhi perasaan senang dengan PPKn dan gemar mengikuti isu nasional. Guru PPKn harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, agar guru PPKn meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan dan memberikan pengetahuannya kepada peserta didik.

3). Kesanggupan Guru PPKn Menambah Wawasan tentang Radikalisme

Kesanggupan penyesuaian atau penyesuaian sosial atau keduanya sekaligus untuk mencapai hubungan- hubungan sosial yang berhasil dapat dilihat dari usia dan sumber daya manusia. Usia dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kemampuan berpikir seseorang. Karena semakin bertambahnya usia seseorang tentu akan mempengaruhi tingkat konsentrasi dalam menanggapi satu objek, masalah ini tentu juga diketahui oleh guru-guru PPKn. Hasil penelitian yang dilakukan mengenai kesanggupan guru PPKn menambah wawasan tentang radikalisme diperoleh skor rata-rata 83,5, artinya guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme dipengaruhi oleh kesanggupan guru PPKn menambah wawasan tentang radikalisme.

Usia dapat mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek karena usia berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang apabila usia semakin bertambah maka akan berakibat pada kemunduran psikologis seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme dipengaruhi oleh usia sebanyak 79 guru PPKn atau 84,95% dan sebanyak 14 guru PPKn atau 15,05% menyatakan usia tidak berpengaruh dalam mempersepsikan radikalisme. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disertai beberapa alasan diantaranya: usia berpengaruh pada persepsi dijelaskan dengan alasan apabila masih muda maka memiliki semangat yang tinggi karena memiliki motivasi dalam menambah wawasan dengan sering membaca akan tetapi ketika berusia tua mencoba belajar dan menambah wawasan dengan membaca, namun beberapa hari kemudian sudah lupa karena kondisi daya ingat lemah.

Faktor lain yang mempengaruhi persepsi guru adalah kualitas sumber daya manusia serta kemauan yang ada dalam diri mereka untuk melatih dan mengembangkan wawasan yang mereka miliki dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Hal tersebut guru PPKn mengatakan bahwa setiap guru memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda. Guru PPKn menyatakan gemar menambah wawasan sebanyak 88 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 94,62%. Namun juga ada pula yang nyaman dengan kemampuannya saat ini sehingga tidak memanfaatkan media-media ilmu pengetahuan sebagai penambah wawasannya karena

malas memanfaatkan sarana yang ada untuk menambah pengetahuan sebanyak 5 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 5,38%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disertai beberapa

Data tersebut dapat diartikan kesanggupan guru PPKn telah mempengaruhi persepsi guru PPKn. Karena dalam memberikan tanggapan tentang radikalisme itu dilihat dari dalam diri guru terutama pada usia yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan dalam menambah wawasan tentang radikalisme dan sumber daya manusia mengenai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.

4). Latar Belakang Sosial Guru PPKn

Proses menanggapi, memberikan pendapat dan interpretasi terhadap satu objek sosial dapat juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya, yang terdiri dari lingkungan, keluarga dan suku, sekolah dan dinas pendidikan guru PPKn wilayah Lamongan

Lingkungan keluarga yang mayoritas berasal dari suku Jawa maka dalam lingkungan keluarga ditanamkan nilai-nilai dan norma budaya Jawa, seperti menanamkan rasa saling menghormati dan tenggang rasa antar agama, saling membantu antarsesama sesuai dengan ajaran budaya Jawa. Hasil penelitian diperoleh 89 guru PPKn atau 95,70% menyatakan dalam lingkungan budaya tidak ada ajaran radikalisme dan sebanyak 4 atau 4,30% guru PPKn menyatakan ada ajaran radikalisme dalam budaya. Perolehan tersebut disertai beberapa alasan yaitu

Guru PPKn mengatakan bahwa dalam lingkungan keluarga tidak diajarkan radikalisme dengan alasan budaya Jawa tidak mengenal radikalisme akan tetapi terdapat norma-norma yang baik seperti unggah-ungguh, *andhap ashor*, kebersamaan dan kekeluargaan, *tepo seliro* dan kelembutan, hidup rukun *agawe sentoso*, tolong menolong, menghormati dan menghargai, sikap toleransi gotong royong dan solidaritas. Selain itu, memiliki nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, budi pekerti yang baik dan benar dalam berfikir dan bertindak khususnya tentang radikalisme sehingga radikalisme bertentangan dengan agama dan adat istiadat masyarakat Jawa.

Selain di lingkungan keluarga, organisasi dapat berpengaruh dalam mempersepsikan sesuatu, baik organisasi di lingkungan pendidikan maupun di luar seperti organisasi politik, agama dan lain-lain. Organisasi mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat yang dapat dijadikan bekal dalam hidup bermasyarakat, dan mendapatkan ilmu/wawasan dalam berfikir, saling tukar pendapat dan memperkuat rasa nasionalisme sehingga berpengaruh dalam mempersepsikan sesuatu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn mengikuti organisasi baik saat ini maupun saat masih

dalam jenjang pendidikan tinggi sebanyak 81 guru PPKn atau 87,10% dan 12 guru PPKn atau 12,90% tidak mengikuti organisasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disertai beberapa alasan yaitu, guru PPKn menyatakan bahwa organisasi berpengaruh dalam mempersepsikan radikalisme apabila organisasi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, unsur-unsur yang terkait dengan konstitusi dan Pancasila. Apabila organisasi memiliki landasan yang baik dan bertanggung jawab maka tujuan juga baik. Sebaliknya, apabila dalam organisasi mempunyai landasan yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab, maka tujuan yang hendak dicapai juga tidak baik.

Di lingkungan pendidikan berkaitan dengan sistem kerja dan program kegiatan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentunya bisa menjadi nilai tambah seseorang untuk memiliki pengetahuan sebagai bahan dalam memberikan wawasan kepada guru PPKn sebanyak 77 guru PPKn atau 82,80%, menyatakan bahwa dalam lingkungan pendidikan berpengaruh dalam persepsi seseorang karena sistem kerja yang ada dalam lingkungan pendidikan dan sebanyak 16 atau 17,20% menyatakan lingkungan pendidikan tidak berpengaruh dalam persepsi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disertai alasan yaitu, guru PPKn yang menjawab lingkungan pendidikan berpengaruh karena sistem kerja lingkungan pendidikan yang menjunjung nilai-nilai Pancasila akan mewujudkan hasil yang sesuai dengan acuan yang dijadikan dalam menjalankan sistem kerja sedangkan yang tidak karena tergantung pada diri sendiri.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guru PPKn menyatakan sistem kerja dan program kerja dalam pendidikan berpengaruh dalam menanggapi radikalisme karena dalam sistem kerja dan program kerja dapat memberikan dampak pada pengetahuan dan wawasan. Akan tetapi, dinas pendidikan masih kurangnya kegiatan yang dapat memberikan wawasan tentang perpaduan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan sehingga dalam mempersepsikan radikalisme ke arah agama Islam.

Data tersebut dapat diartikan bahwa lingkungan sosial dapat mempengaruhi persepsi guru PPKn tentang radikalisme diperoleh bahwa skor rata-rata 82,33. Artinya guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Ketika lingkungan keluarga, pendidikan memberikan kesempatan dan memotivasi dalam menambah wawasan tentang radikalisme. Artinya Ketika lingkungan mendukung (hidup rukun, toleransi dan saling tolong menolong) tidak menutup kemungkinan tidak setuju dengan radikalisme, dan sebaliknya apabila lingkungan tidak mendukung maka guru PPKn setuju dengan radikal.

Faktor Struktural (Objek) Radikalisme

Guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme dipengaruhi oleh karakteristik radikalisme yang meliputi sifat gerakan radikal, gerakan radikal yang sering dilakukan, faktor yang melatarbelakangi radikal dan dampak yang ditimbulkan radikal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Karakteristik Radikalisme

Karakteristik radikalisme meliputi sifat radikalisme yang keras, bentuk kekerasan, dan faktor apa yang mendorong radikalisme di Indonesia. Pada sifat radikalisme diperoleh sebanyak 70 guru PPKn atau 75,27% menyatakan bahwa radikalisme merupakan paham yang keras. Berdasarkan hasil penelitian tersebut guru PPKn memberikan alasan bahwa bisa dikatakan radikalisme ketika ada unsur kekerasan, memaksakan kehendak dengan menghalalkan segala cara, mengancam keutuhan NKRI dan dapat menghilangkan sikap toleransi, karena menganggap orang/kelompok lain tidak sejalan dengan kelompoknya dan menganggap paling benar sebesar dan nasionalisme. Sedangkan sebanyak 23 guru PPKn atau 24,73% mengatakan bahwa radikalisme adalah paham yang tidak keras karena radikalisme merupakan paham perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Radikalisme juga bisa mengarah pada hal yang positif seperti para pejuang dahulu yang memperjuangkan nasib bangsa dari penjajahan bangsa asing dan penguasa bertindak sewenang-wenang bila sudah diingatkan dengan cara yang baik tidak didengarkan, perubahan yang radikal perlu ada agar negara tidak terus menerus larut dalam kesewenangan dan ketidakadilan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai radikalisme adalah paham keras karena menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan dengan memaksakan kehendak dengan menghalalkan segala cara, tidak bisa menerima perbedaan karena dapat menghilangkan sikap toleransi karena menganggap orang /kelompok lain tidak sejalan dengan kelompoknya dan menganggap paling benar sebesar dan nasionalisme dan radikalisme merupakan paham yang keras tidak diperbolehkan dalam Islam sehingga mengancam keutuhan NKRI. Artinya guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme dengan melihat dari tanda-tanda dari tindakan dan sikap yang dilakukan oleh gerakan radikal.

Bentuk radikalisme dibedakan menjadi dua yaitu fisik dan non fisik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh sebanyak 82 guru PPKn atau 88,17% menyatakan bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal adalah fisik dan non fisik dan sebanyak 11 guru PPKn atau 11,83% menyatakan bahwa bentuk radikalisme bukan fisik dan nonfisik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disertai beberapa alasan yaitu,

guru PPKn menyatakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal tidak berupa fisik dan non fisik dengan alasan tergantung pada individu masing-masing dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan aturan dan sanksi yang tegas sebanyak 11 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 11,83%. Artinya guru PPKn dalam mempersepsikan dipengaruhi oleh objek yang dilihat yaitu melalui bentuk aksi kekerasan yang pernah dilakukan oleh gerakan radikal. bentuk kekerasan yang dilakukan oleh gerakan radikal yaitu kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan non fisik seperti ideologi pemikiran dan demonstrasi masif dan sikap yang berlawanan, bentuk yang ekstrim, revolusioner dan militan.

Munculnya radikalisme di Indonesia pasti ada yang melatarbelakangi keberadaanya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 83 guru PPKn atau 89,25% menyebutkan faktor yang mendominasi munculnya radikalisme. Adapun faktor yang mendominasi munculnya radikalisme yaitu pemahaman keagamaan yang sempit sebanyak 19 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 20,43% guru PPKn. Diskriminasi atas ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan sebanyak 16 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 17,20%. Keinginan menjadi penguasa sebanyak 8 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 8,60%. Faham yang tidak disukai dengan isi kandungan Pancasila sebanyak 3 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 3,22%. Kepentingan politik dengan mengatasnamakan agama sebagai pelindung dan mendoktrinasi dari penguasa yang berlebihan yang bersumber dari legitimasi teks sebanyak 12 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 12,90%. Ketidakpuasan atau kurang percaya dengan pemerintah sebanyak 10 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 10,75%. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai, arti kebersamaan, gotong royong, keadilan dan kurangnya pemahaman berbangsa dan bernegara sebanyak 7 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 7,53%. Demokrasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan budaya politik dan adat istiadat sebanyak 4 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 4,30%. Penegakan hukum yang kurang sebanyak 4 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 4,30%.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor yang melatarbelakangi radikalisme menunjukkan bahwa guru PPKn dalam mempersepsikan dipengaruhi oleh faktor yang kemunculan radikalisme. Ketika mempersepsikan radikalisme guru PPKn harus mengetahui faktor yang melatarbelakangi radikalisme terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa faktor yang mendorong radikalisme adalah pemahaman keagamaan yang sempit sehingga dalam mempersepsikan radikalisme menonjol ke radikalisme agama.

2). Dampak Radikalisme

Dampak radikalisme yang timbul pada guru PPKn terdiri dari relevansi Pancasila saat ini dan ancaman bagi Indonesia. Radikalisme dapat mengancam relevansi Pancasila, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa guru PPKn menyatakan saat ini Pancasila masih relevan sebanyak 77 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 82,80% dan guru PPKn menyatakan Pancasila sudah tidak relevan lagi. Adapun pernyataan Pancasila masih relevan dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila anti radikalisme dan Pancasila merupakan ideologi bangsa yang digali dari budaya bangsa sendiri yang berupa nilai-nilai luhur bangsa sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk sehingga disepakati sebagai dasar bernegara dan sudah mengkristal yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak bisa diganti oleh ideologi apapun dan sampai saat ini Pancasila masih menjadi penangkal radikalisme di negara Indonesia yang berbhinneka sehingga upaya mereaktualisasi. Sedangkan yang menyatakan tidak relevan sebanyak 16 guru PPKn atau dipersenkan menjadi 17,20%. Karena radikalisme tidak berazaskan Pancasila sehingga tidak mengakui yang nama perbedaan dalam sebuah negara sehingga Pancasila tidak relevan lagi maka akan kehilangan nilai-nilai universal seperti keberadaban, penghormatan HAM, perdamaian dan keadilan, serta Radikalisme itu hanya mementingkan kepentingan agama saja karena sebagai orang Islam lebih suka jika Indonesia berideologi pada Al-Quran dan hadits.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat menjawab dampak radikalisme yang dipikirkan oleh guru PPKn mengenai eksistensi Pancasila dengan radikalisme. Hasil penelitian tersebut telah menunjukkan Pancasila masih relevan dibuktikan dengan sebanyak 82,80% guru PPKn menyatakan Pancasila masih relevan sampai kapanpun dan Pancasila anti radikalisme karena Pancasila merupakan ideologi bangsa yang di gali dari budaya bangsa sendiri yang berupa nilai-nilai luhur bangsa sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk sehingga disepakati sebagai dasar bernegara dan sudah mengkristal yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak bisa diganti oleh ideologi apapun.

Radikalisme telah memberikan ancaman bagi Indonesia sebanyak 82 guru PPKn atau 88,17% dan menyatakan bahwa radikalisme tidak memberikan ancaman bagi Indonesia sebanyak 11 guru PPKn atau 11,83% karena radikalisme merupakan paham keras bagi keutuhan bangsa, radikalisme ingin menguasai dan membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah karena ingin menghancurkan RI dan radikalisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta radikalisme menganggap Pancasila tidak sesuai dengan agama dan harus. Sedangkan sebanyak 11, 83% guru

PPKn menyatakan bahwa tidak ada ancaman dengan alasan bahwa tidak semua radikalisme itu mengancam keutuhan bangsa dan Negeri ini didirikan pejuang muslim dan perserikatan lain, maka tidak mungkin orang Islam akan menghancurkan negerinya sendiri serta Indonesia sudah memiliki pemimpin yang bijaksana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat menjawab dampak radikalisme yang dipikirkan guru PPKn mengenai ancaman yang timbul bagi Indonesia, diperoleh 88,17% guru PPKn menyatakan radikalisme telah memberikan ancaman bagi Indonesia. Karena radikalisme tidak mengenal toleransi suku dan agama atau perbedaan yang lainnya sehingga menimbulkan sifat negatif. Selain itu radikalisme ingin menguasai negara dan membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah sehingga rawan terjadi perpecahan, ingin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memecah belah keutuhan bangsa bahkan dapat merusak integritas bangsa dan tatanan hidup berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor struktural yaitu guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme dipengaruhi oleh faktor objek yang akan diamati atau ditanggapi dari sifat radikalisme dan dampak radikalisme diperoleh bahwa dari faktor objek dapat mempengaruhi persepsi guru PPKn karena dilihat dari sifat radikalisme yang merupakan paham yang keras, karena terdapat kekerasan dan faktor yang mendominasi munculnya radikalisme dibuktikan dari skor rata-rata 78,33. Artinya guru PPKn menyatakan bahwa sifat radikalisme yang keras. Selain dari sifat radikalisme dapat juga dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari radikalisme yang dapat mempengaruhi guru PPKn yaitu mengenai relevansi Pancasila dan dampak dari radikalisme menunjukkan bahwa Pancasila masih relevan dan radikalisme memberikan dampak bagi warga negara dan stabilitas bangsa dibuktikan dari skor rata-rata 79,50. Artinya guru PPKn menyatakan dampak radikalisme dapat mempengaruhi persepsi guru PPKn karena tidak sesuai dengan karakter guru PPKn dan bangsa.

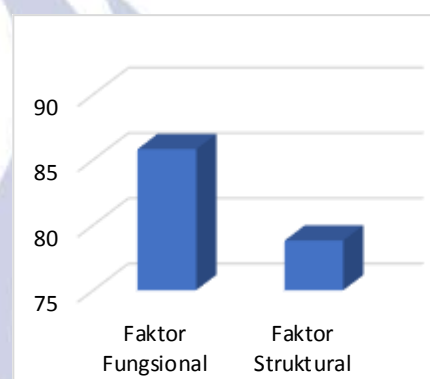
Berdasarkan data tersebut diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia adalah faktor fungsional atau faktor pribadi guru PPKn dan faktor struktural atau faktor objek. Hal tersebut dilakukan pengelompokkan kriteria faktor yang berpengaruh dalam persepsi guru PPKn yang dapat diketahui pada tabel 6.

Tabel 6. Pengelompokkan Kriteria Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Guru PPKn SMA Wilayah Lamongan tentang Radikalisme di Indonesia

| Skor | Kriteria Faktor | Frekuensi |
|-------|-------------------|-----------|
| 9–15 | Berpengaruh | 93 |
| 0 – 8 | Tidak Berpengaruh | 0 |

Hasil pengelompokkan kriteria faktor yang mempengaruhi persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia kemudian dimasukkan kedalam rumus persentase. dari persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan memiliki persepsi negatif pada radikalisme di Indonesia dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Ditinjau dari rumus persentase di atas, dari 100% jumlah keseluruhan diketahui bahwa faktor fungsional dan struktural mempengaruhi persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia.

Untuk menentukan faktor yang berpengaruh dapat dilihat dari perolehan skor rata-rata 85,8 dari faktor fungsional dan skor rata-rata 78,8 dari faktor struktural. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:



Grafik 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Guru PPKn SMA Di Wilayah Lamongan tentang Radikalisme di Indonesia

Guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme di Indonesia dipengaruhi oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berkaitan dengan dalam diri individu dan faktor struktural dari faktor objek. Artinya guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme di Indonesia tidak dipengaruhi faktor fungsional saja tetapi dari faktor struktural juga sangat berperan. Namun, berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa faktor fungsional lebih tinggi dari pada faktor struktural, sehingga faktor yang paling berpengaruh adalah faktor fungsional di buktikan dengan perolehan 92,26% guru PPKn menyatakan bahwa radikalisme tidak sesuai dengan kepribadian guru PPKn.

Pembahasan

Persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia cenderung tidak setuju dengan radikalisme. Guru PPKn menyatakan bahwa radikalisme merupakan paham yang keras yang dilatarbelakangi oleh pemahaman tentang agama yang sempit sehingga mudah dimanfaatkan dalam kepentingan politik dengan atas nama agama sehingga agama cenderung dijadikan

ideologi dan politik bukan sebatas agama sebagai dimensi ritual dan spiritual. Hal itu dapat membuktikan bahwa radikalisme di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk negara Islam adalah paham yang bertujuan lain, dalam hal ini diharapkan guru PPKn lebih kritis dalam menanggapi mengenai paham radikal yang terjadi di dalam negara.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada guru PPKn SMA wilayah Lamongan maka dapat diketahui persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme di Indonesia sesuai dengan teori persepsi Burner dalam pengambilan keputusan dalam menanggapi radikalisme di Indonesia. Adapun empat tahapan tersebut adalah:

1. Kategori premitif, guru PPKn hanya menilai radikalisme merupakan paham yang keras yang berupa satu gerakan dan pemikiran dengan aksi kekerasan seperti terorisme yang lahir dari agama Islam yang bercorak skriptualis dan tekstualis. Padahal radikalisme dan terorisme itu berasal dari gerakan kebrutalan atas nama agama bukan dari agama Islam saja. Sehingga Islam dapat diartikan agama yang keras, padahal dari arti Islam adalah bersih, damai, ramah, dan toleran. Hal ini karena kelompok radikal sering menggunakan aksi kekerasan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengatasnamakan agama. Sehingga agama bukan sebagai dimensi ritual dan spritual saja melainkan ideologis dan politik. Dibutikan dengan faktor yang melatarbelakangi radikalisme, guru PPKn SMA wilayah Lamongan menyatakan kepentingan agama yang paling mendorong radikalisme daripada kepentingan ekonomi, politik, budaya dan psikologi. Namun, pada keberadaan radikalisme Indonesia guru PPKn sudah memiliki persepsi negatif.
2. Mencari tanda, Guru PPKn juga mencari informasi tentang radikalisme dengan mengamati lingkungan sekitar mengenai kemunculan radikalisme di Indonesia, faktor-faktor yang melatarbelakangi radikalisme di Indonesia, sikap radikal dan tindakan radikal untuk menguatkan jawaban yang sudah dimiliki sebelumnya. Upaya tersebut sebagai bahan untuk untuk mengkategorisasikan radikalisme.

Tahap ini guru PPKn menyatakan bahwa radikalisme bukan berupa terorisme saja namun bentuk kekerasan atas nama agama dan aksi kekerasan lainnya yang menyimpang dari ideologi negara. Faktor yang mendorong munculnya radikalisme yang paling mendominasi adalah faktor kepentingan agama dan pemahaman yang sempit. Padahal faktor sosial, ekonomi, politik dan

spikologis juga merupakan faktor yang mendorong munculnya radikalisme. Agama dijadikan ideologi dan menjadi senjata publik digunakan untuk mencari dukungan terhadap radikalisme seperti dalam mengartikan jihad.

Kelompok radikal memiliki sifat tertutup dengan orang maupun kelompok di luar kelompoknya dan fanatik yang berlebih-lebihan terhadap keyakinan, kelompok dan pendapatnya, serta dapat mengkafirkan orang yang berbeda keyakinannya. Tindakan radikal ditandai oleh kekerasan yang harus dilakukan untuk mengubah satu keadaan seperti yang diinginkan, seperti dalam politik gerakan sebagai radikal adalah tindakan makar, demonstrasi dan protes yang anarkis serta kekerasan yang merusak. Tindakan tersebut juga didorong oleh motif ajaran serta nilai yang diyakininya karena radikalisme bertujuan untuk mendirikan sistem yang sesuai dengan nilai yang dicitakan yang berbeda dengan yang ada. Motif tersebut dilandaskan pada tidak menerima pembangunan, perubahan dan konsep kemajuan dan ketidakpuasan yang sangat tinggi pada pemerintah dngen cara cara yang ekstrem.

Berdasarkan uraian di atas bahwa guru PPKn mencari tanda radikalisme di Indonesia, faktor yang mendorong radikalisme, dukungan terhadap radikalisme terkait upaya kelompok radikal dalam mencari dukungan. Selain itu mencari tanda tindakan radikal dan sikap radikal yang dilakukan oleh kelompok radikal diperoleh bahwa dari semua kategori tersebut guru PPKn tidak setuju dengan semua kategori mengenai radikalisme.

3. Tahap mengkonfirmasi, guru PPKn melalui panca indra mengenai informasi dan pengamatan sesuai dengan kenyataan terkait radikalisme di Indonesia. Dari semua kategori pada tahap sebelumnya guru PPKn dapat mengetahui keberadaannya, upaya mencari dukungan, sikap, tindakan radikal. Sehingga guru PPKn mampu memberikan konfirmasi terkait konsensus kebangsaan terhadap konsep Islam yang diinginkan oleh kelompok dalam mencapai tujuan dengan cara mengganti ideologi Pancasila dengan Islam versi mereka, mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dengan hukum Islam, mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Khilafah dan perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika) itu sebagai kehancuran.

Perubahan yang diinginkan oleh gerakan radikal, hal tersebut guru PPKn tidak setuju, meskipun di Indonesia mayoritas menganut agama Islam tetapi minoritas dari agama Kristen, Hindu, Budha dan

agama lainnya yang resmi diakui Indonesia mempunyai hak untuk hidup dan tinggal di Indonesia. Jika sebagian umat Islam menginginkan membentuk negara Islam dengan menerapkan syariat Islam dan sistem pemerintahan dengan kekhilafan, maka selain umat Islam juga membentuk negara Kristen, Negara Buddha atau negara Hindu. Pembentukan negara agama di Indonesia merupakan bentuk egoisme dan politik atas nama agama. Selain itu, Islam merupakan agama yang damai, santun, ramah dan toleran maka mempunyai kewajiban menghargai agama lain jika Islam ingin dihargai dan Islam tidak diajarkan memaksakan kehendaknya kepada agama lain.

4. Tahap konfirmasi tuntas yaitu kesimpulan atas data, Melalui persepsi guru PPKn tentang radikalisme di Indonesia diperoleh persepsi negatif tentang radikalisme di Indonesia karena dapat menghancurkan agama Islam, tatanan negara dan stabilitas nasional. Dari persepsi tersebut guru PPKn dipengaruhi oleh faktor pribadi meliputi kebutuhan guru PPKn tidak sesuai dengan radikalisme, senang dengan PPKn, gemar mengikuti berita tentang perkembangan nasional, usia, sumber daya manusia dalam menambah wawasan tentang radikalisme dan lingkungan keluarga, organisasi dan pendidikan guru PPKn. Selain itu guru PPKn dalam mempersepsikan radikalisme dipengaruhi oleh faktor objek yaitu karakteristik sifat objek yang keras, kekerasan yang dilakukan yaitu fisik dan non fisik dan faktor yang mendominasi munculnya radikalisme adalah agama. Selain itu dampak yang ditimbulkan radikalisme adalah dapat menggantikan Pancasila, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila masih relevan sampai kapanpun dan radikalisme dapat menimbulkan dampak bagi stabilitas nasional.

Persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tidak setuju terhadap keberadaan radikalisme di Indonesia, meskipun sudah ada sejak zaman kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka sampai proses kemerdekaan Negara Indonesia. Kemunculan radikalisme di dorong oleh faktor teologis dan non-teologis, teologis yaitu doktrin-doktrin agama, sedangkan non-teologis yaitu faktor politik, ekonomi, dan psikologi. Faktor non teologi merupakan faktor yang sangat dominan yang melatarbelakangi munculnya radikalisme di Indonesia. Faktor-faktor tersebut dialihkan ke faktor teologis yang dijadikan sebagai tameng untuk mencapai tujuan. Di Indonesia mayoritas agama Islam sehingga cepat untuk menimbulkan konflik. Sehingga menjadikan nilai-nilai Islam sebagai agama yang damai menghilang.

Sebagian kelompok Islam membentuk beberapa kelompok yang berideologi menggunakan ideologi Islam dengan memberikan contoh cara hidup kesalehan yang dapat menimbulkan daya tarik bagi kalangan umat Islam Indonesia seakan-akan memberikan solusi dalam permasalahan politik dan agama. Padahal daya tarik yang ditawarkan hanya rekayasa semata agar dapat memperkuat pergerakan radikalisme. Pergerakan tersebut dibentuk dengan doktrin dan ajaran keagamaan yang berupa kesalehan sebagai cara pandang yang menjadi daya tarik sebagian umat Islam Indonesia, tetapi itu semua merupakan jebakan ditengah jalannya Islam Indonesia yang berwatak santun dan ramah. Kemunculan gerakan Islam yang bercorak radikal tersebut dampak yang ditimbulkan radikalisme kepada warga negara dan stabilitas negara. Karena para penggerak Islam menginginkan politik dan kekuasaan untuk mendirikan negara Islam, menerapkan Syari'ah dan memahami agama dan politik sebagai satu kesatuan.

Guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme diperoleh persepsi negatif karena tidak setuju dengan upaya mencari dukungan radikalisme karena apa yang dilakukan oleh gerakan radikal dalam memahami dan memaknai nilai-nilai doktrin dan ajaran Islam yang menyimpang, seperti konsep Jihad yang merupakan ajaran dan doktrin yang disalah fahami oleh gerakan radikal. Bahwa konsep itu selalu difahami sebagai keharusan melakukan perang untuk memerangi orang yang berbeda keyakinan dan mungkar. Pemahaman kaku tersebut menimbulkan ketegangan dan konflik dalam kalangan umat Islam. Penafsiran doktrin dan ajaran tersebut dapat menentukan konstruksi kehidupan gerakan umat Islam yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dan perilaku pergerakannya. Selain itu untuk mengatasi pergolakan arus globalisasi, gerakan radikal memberikan pemahaman kehidupan dapat dimanfaatkan oleh sebagian kawasan Islam memperlihatkan wajah yang dogmatis dan normatif dengan memberikan cara hidup kesalehan. Kesalehan tersebut direkayasa untuk memperkuat gerakan radikal. Upaya yang dilakukan oleh gerakan radikal dalam mencari dukungan dengan memberikan pemahaman ajaran dan keyakinan, juga memberikan motivasi dan menjanjikan mendapat hadiah atau imbalan. Sebagian umat Islam yang mudah terpengaruh mengenai hal ini karena kondisi sosial ekonomi yang kurang mampu dan kondisi psikologi yang lemah atau gangguan kejiwaan.

Guru PPKn SMA wilayah Lamongan tidak setuju dengan tindakan radikal yang menggunakan kekerasan. Radikalisme merupakan sebuah paham yang menginginkan suatu perubahan sampai ke akarnya dengan cepat. Perubahan tersebut memberikan reaksi penerimaan dengan senang dan penolakan dengan keras.

Penolakan yang terjadi karena ketidakpuasan gerakan radikal kepada pemerintah yang menerapkan sistem pemerintahan sekular sehingga lebih menguntungkan negara Barat daripada negara sendiri dan merasa umat muslim sebagai boneka negara Barat. Sehingga dapat mendorong umat Islam memperkuat gerakan dalam memperjuangkan politik.

Upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan politik, gerakan radikal menggunakan cara teologis dengan memberikan pemahaman dan keyakinan dengan cara yang menjelekkan agama lain dan memberikan pemahaman yang salah yang menyimpang dari nilai-nilai agama Islam yang damai, santun dan damai. Selain itu, tindakan yang dilakukan gerakan radikal untuk memperjuangkan politik dan pengaruh dari Barat dengan menggunakan kekerasan seperti mendahulukan dalam menyelesaikan masalah dengan kekerasan, menggunakan senjata dalam memerangi agama lain, selain itu melakukan bom bunuh diri.

Tindakan tersebut bertujuan menggerakkan pemerintah agar menjalankan syariat Islam dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat agar dapat menggulingkan pemerintah yang sah, dengan melakukan demonstrasi yang mengajak warga negara untuk mengemukakan pendapatnya akan tetapi demonstrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan itu terjadi karena kekecewaan kepada pemerintah dan kegagalan elit politik umat Islam dalam mewujudkan Islam politik. Selain itu, gerakan radikal juga melakukan penyegelan dan pengrusakan rumah ibadah yang bermasalah, padahal belum tentu benar dan bukan kewenangannya. Penyegelan dan pengrusakan tempat hiburan malam, dan melakukan pembelaan dengan senjata terhadap umat Islam dari ancaman agama lain.

Guru PPKn SMA wilayah Lamongan tidak setuju dengan radikalisme karena sikap yang dimiliki individu dalam gerakan radikal memiliki sifat tertutup dengan orang lain diluar kelompoknya. Gerakan ini merasa bahwa dirinya maupun kelompoknya paling benar dan yang lainnya salah. Sehingga mudah berprasangka buruk kepada orang kelompok maupun agama lain, sehingga pelaku radikal mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sama dengan keyakinan dan pemikiran karena fanatik yang berlebihan dalam keimanan, pendapat dan kelompok.

Guru PPKn SMA wilayah Lamongan tidak setuju terhadap konsensus kebangsaan diubah dengan konsep Islam. Gerakan radikal menginginkan pembentukan negara Islam yang berideologi Islam, padahal itu bertentangan dengan Pancasila. Islam dan Pancasila merupakan konsensus yang sama-sama final bagi tokoh Islam dan tokoh nasional sehingga tidak bisa diubah

begitu saja. Apabila Islam dijadikan sebagai ideologi di Indonesia bagaimana dengan agama Kristen, Hindu, Budha, dan agama lain yang diakui di Indonesia. Padahal mempunyai hak hidup di negara Indonesia dan masing-masing agama tersebut pernah berjuang dalam proses kemerdekaan dan ikut serta dalam membentuk negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Jika sebagian umat Islam menginginkan membentuk negara Islam dengan menerapkan syariat Islam dan sistem pemerintahan dengan kekhalifan, maka selain umat Islam juga membentuk negara Kristen, negara Budha atau negara Hindu.

Persepsi guru PPKn tentang radikalisme dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berkaitan dengan pribadi dan faktor struktural berkaitan dengan objek yang diamati. Faktor pribadi dalam guru PPKn mempunyai kemampuan atau kebangsaan dan kewarganegaraan, karena guru PPKn mengenal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga memiliki pengetahuan kebangsaan dan kewarganegaraan, apabila guru PPKn mengerti seluk beluk tentang kebangsaan dan kewarganegaraan maka akan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui sikap kewarganegaraan yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka mampu mengaplikasikan dalam bentuk keterampilan kewarganegaraan. Radikalisme tidak sesuai dengan kepribadian guru PPKn karena tujuan dari PPKn adalah membentuk manusia Indonesia yang religius, nasionalis, adil, demokratis, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan demokratis serta menjadikan manusia Indonesia yang cerdas dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh antara faktor pribadi dan faktor objek dalam mempersepsikan radikalisme. Hasil penelitian diperoleh persepsi negatif karena memiliki faktor pribadi yang baik dan faktor objek yang kasar dan sebaliknya, persepsi positif dipengaruhi faktor pribadi yang tidak baik dan faktor objek yang halus. Namun faktor yang paling berpengaruh adalah faktor fungsional atau faktor pribadi, karena radikalisme tidak sesuai dengan kepribadian guru PPKn dan karakter bangsa.

PENUTUP

Simpulan

Persepsi guru PPKn SMA wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia tergolong persepsi negatif didapatkan 94,62% atau 88 guru PPKn menyatakan tidak setuju dengan radikalisme. Data tersebut diperoleh dari lima indikator. Pertama, keberadaan radikalisme diperoleh skor rata-rata 72,42 termasuk kategori persepsi negatif. Kedua, dukungan terhadap radikalisme diperoleh skor rata-rata 83,60 termasuk dalam kategori persepsi

negatif. Ketiga, tindakan radikal diperoleh skor rata-rata 80,64 termasuk dalam kategori persepsi negatif. Keempat, sikap radikal diperoleh skor rata-rata 88 termasuk dalam kategori persepsi negatif. Kelima, konsensus kebangsaan terhadap konsep Islam diperoleh skor rata-rata 79,87 termasuk dalam kategori persepsi negatif. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru PPKn tentang radikalisme persepsi guru PPKn SMA di wilayah Lamongan tentang radikalisme di Indonesia termasuk dalam kriteria tidak setuju/persepsi negatif. Artinya guru PPKn tidak setuju dengan radikalisme di Indonesia karena keberadaan radikalisme, dukungan terhadap radikalisme, tindakan radikal, sikap radikal dan pembentukan negara Islam beserta penerapan syari'at Islam di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, Konstitusi dan semboyan Negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi guru PPKn adalah faktor fungsional atau pribadi guru PPKn dan faktor struktural atau radikalisme, dilihat dari hasil penelitian diperoleh persentase 100% guru PPKn dalam mempersepsikan di pengaruhi faktor pribadi guru PPKn dan faktor radikalisme. Namun dari kedua faktor ini ada salah satu faktor yang paling berpengaruh dilihat dari hasil penelitian diperoleh skor rata-rata 85,8 faktor fungsional dan skor rata-rata 78,8 maka faktor pribadi lebih tinggi dari pada faktor objek, sehingga faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pribadi, artinya radikalisme tidak sesuai dengan kepribadian guru PPKn.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, menunjukkan persepsi guru PPKn SMA tentang radikalisme di Indonesia persepsi negatif, meski ada beberapa guru PPKn tergolong persepsi positif. Untuk itu perlu diadakannya perbaikan kompetensi profesionalitas sebagai guru dan menjalankan peran dan fungsinya agar menjadikan peserta didik yang warga negara yang baik dan cerdas dalam menyikapi radikalisme yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menambah wawasan tentang radikalisme, kebangsaan dan keagamaan mengingat radikalisme dalam dunia pendidikan merupakan ancaman.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2007). *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka

Iskandar. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Referensi

Jainuri, Ahmad. 2016. *Radikal dan terorisme, akar ideologi dan tuntutan aksi*. Malang

Kartodirdjo, Sartono. *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985)

Mulyasa. E. 2007. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rakhmat, Jalaluddin. 2000. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: remaja Rosdakarya

Robbins, Stephen P. 2002. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia

Rubaidi, A. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007)

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Abror, Mufidul. 2016. *Radikalisme dan Deradikalisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (Studi Multi Kasus di SMAN 3 Lamongan dan SMK NU Lamongan)*. Tesis tidak di terbitkan. Surabaya: PPs Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Anwar, Azzam. 2012. BNPT. *Peran lembaga Konvensional dan IT dalam mencegah Intoleransi dan radikalisme di Jawa Timur*. Artikel

Hamdani. 2012. *Deradikalisasi Gerakan Terorisme (Analisis Politik Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasi Terorisme BNPT 2012)*. Semarang: PPs. Institt Agama Islam Negeri Walisong

Yudha, Sakti Wira. 2012. *Radikalisme Kelompok Islam (Analisis Struktur Agen Terhadap Wacana Radikalisme Kelompok Islam Pasca Orde Baru)*. Tesis tidak diterbitkan. Depok: PPs Universitas Indonesia

MPR RI.2003. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Sidiknas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2015. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Astuti, Lutfi Dwi Puji, Fishal, Nur. 6 Mei 2016. *Waspada Regenerasi Teroris di Tiga Daerah Jawa Timur*. (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/769235-waspada-regenerasi-teroris-di-tiga-daerah-jawa-timur>).Diakses pada tanggal 18 Januari 2017

Saidi, Anas. 19 Februari 2016. *Anak-anak muda Indonesia makin radikal* (<http://lipi.go.id/berita/single/Anak-anak-muda-Indonesia-makin-radikal/15089>). Diakses pada tanggal 18 Januari 2017